

# SINERGITAS STAKEHOLDERS DALAM IMPLEMENTASI PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI DESA

**Fadjarini Sulistyowati<sup>1</sup>, Subejo<sup>2\*\*</sup>, Muhamad Sulhan<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Prodi Doktoral Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan SPS UGM dan Sekolah Tinggi  
Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

<sup>2</sup>Prodi Doktoral Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan SPS UGM dan Prodi S1 Penyuluhan  
dan Komunikasi Pertanian Fakultas Pertanian UGM Yogyakarta

<sup>3</sup>Departemen Ilmu Komunikasi FISIPOL UGM Yogyakarta dan Prodi Doktoral Penyuluhan dan  
Komunikasi Pembangunan SPS UGM

**\*\* Corresponding Author: [subejo@ugm.ac.id](mailto:subejo@ugm.ac.id)**

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat salah satunya dimanfaatkan untuk memudahkan pengelolaan administrasi desa yakni melalui Sistem Informasi Desa (SID). Sistem informasi Desa menjadi ruang penyampaian informasi dan komunikasi bagi perangkat desa ke warganya. SID diberlakukan sejak adanya UU Desa No.6 Tahun 2014 namun implementasi SID sampai saat ini belum optimal. Ada beberapa kendala dalam implementasi SID, permasalahan utama sebagai inovasi baru sehingga perlu persiapan sumberdaya manusia dan infrastruktur serta tata kelola dalam pengaturannya. Faktor tatakelola bertumpu pada komunikasi, koordinasi dan pembagian kerja antar pihak yang bertanggungjawab. Sejak 2017 Panggungharjo merupakan salah satu desa yang mampu menginisiasi SID dengan mengawalinya melalui pendirian lembaga desa khusus untuk SID. Penelitian ini menggunakan teori strukturalis dari Antony Giddens dalam melihat sinergitas *stakeholders* untuk mengimplementasikan SID. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran sinergitas *stakeholders* yang bertumpu pada komunikasi dan koordinasi antar *stakeholders* dalam implementasi SID. Jenis penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kritis, yang menyajikan gambaran spesifik tentang situasi dan fenomena di desa tersebut. Pengumpulan data dilakukan wawancara kepada informan yang terdiri dari: kepala desa dan carik desa, perangkat desa pengelola SID Panggungharjo, unsur masyarakat yang terdiri dari anggota PKK, kepala dusun dan karang taruna. Teknik analisis data dengan teknik analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan sinergitas *stakeholders* berperan dalam implementasi SID di Kalurahan Panggungharjo. Sinergitas ini terwujud karena adanya komunikasi antar pihak dan koordinasi di Kalurahan Panggungharjo. Sesuai teori strukturalis, kepimpinan kepala desa diikuti dengan berdirinya lembaga yang kompeten dan pembagian kerja serta wewenang jelas merupakan dualitas struktur yang berjalan beriringan.

**Kata-kata kunci:** Implementasi<sup>1</sup>, Sistem Informasi Desa<sup>2</sup>, Strukturalis<sup>3</sup>, Sinergitas *stakeholders*<sup>4</sup>

## ABSTRACT

*The development of information and communication technology has progressed rapidly, one of which has been utilized to facilitate village administrative management through the Village Information System (SID). The Village Information System functions as a medium for delivering information and communication between village officials and the community. SID has been implemented since the enactment of Village Law No. 6 of 2014, yet its implementation has not been fully optimal. Several challenges have arisen in the implementation of SID, primarily because it is a new innovation that requires adequate preparation in terms of human resources, infrastructure, and governance arrangements. The governance factor relies heavily on communication, coordination, and division of tasks among responsible parties. Since 2017, Panggungharjo Village*

*has been one of the pioneers in initiating SID, beginning with the establishment of a dedicated village institution to manage it. This study employs Anthony Giddens' Structuration Theory to examine the synergy among stakeholders in implementing SID. The objective of this study is to analyze the role of stakeholder synergy, which is based on communication and coordination, in the implementation of SID. This research adopts a qualitative approach with a critical-descriptive method, providing a specific depiction of the situation and phenomena within the village. Data were collected through interviews with key informants, including the village head, the village secretary, SID management staff, and community representatives such as PKK members, hamlet heads, and youth organization (karang taruna) members. Data analysis was conducted using the interactive analysis technique. The findings indicate that stakeholder synergy plays a significant role in the implementation of SID in Panggunharjo Village. This synergy is realized through effective communication and coordination among stakeholders. In line with Structuration Theory, the leadership of the village head, supported by the establishment of a competent institution and the presence of a clear division of labor and authority, reflects the duality of structure that operates in tandem.*

**Keywords:** Implementation<sup>1</sup>, Village Information System<sup>2</sup>, Structuration<sup>3</sup>, Stakeholder Synergy<sup>4</sup>

## PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi telah memberikan dampak signifikan dalam berbagai sektor. Perkembangan teknologi dan informasi 4.0 bahkan saat ini memasuki era 5.0 memengaruhi segala aspek kehidupan manusia dan mengubah perilaku dalam keseharian (Nur & Maulani, 2024). Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi juga masuk ke desa yang mendukung reformasi dan pembangunan pedesaan (Nugroho, 2010). Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga mendorong penggunaan teknologi digital dalam sistem informasi hingga memunculkan banyak aplikasi baru untuk memudahkan pengelolaan baik di sektor kesehatan, pendidikan maupun pemerintahan.

Di era digital, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi memudahkan manajemen termasuk manajemen administrasi desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan secara efisien dan transparans (Hermawan et al., 2024). Selain itu, keberadaan teknologi komunikasi dan informasi lebih memperluas kesempatan bagi pelibatan masyarakat serta meningkatkan efektivitas dalam pelayanan publik (Juiz et al., 2014 ;Nely Suwidiyanti, 2023). Berarti dalam hal ini keberadaan teknologi informasi memberikan dampak yang signifikan untuk kemajuan desa. Keberadaan adanya aplikasi sistem informasi yang diatur dalam UU Desa No. 6 Tahun 2014 mendorong pelibatan masyarakat desa untuk memantau informasi dan pengelolaan desa.

Sesuai dengan UU Desa No. 6 Tahun 2014, desa diberikan kewenangan dalam mengatur pemerintahannya yang diharapkan mendorong kemandirian desa. Sebagai salah satu upaya meningkatkan pelibatan masyarakat dan efisiensi pelayanan serta transparansi informasi maka dalam UU Desa diatur tentang Sistem informasi Desa. Sistem Informasi Desa (SID) pada Pasal 86 merupakan salah satu inovasi teknologi informasi dan komunikasi yang dirancang untuk mendukung tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Melalui SID, data dan informasi terkait kependudukan, pelayanan publik, perencanaan pembangunan, hingga pelaporan keuangan desa dapat dikelola secara digital.

Desa membutuhkan pengelolaan administrasi yang baik sehingga keberadaan sistem informasi dan teknologi informasi bukan hanya sebagai pendukung namun memiliki peran strategis dan potensi besar dalam mendukung efisiensi, produktivitas dan efektivitas organisasi (Thomas L. Wheelen et al., 2015 ; Nugraha, 2018). Keberadaan SID diharapkan mendorong tatakelola pemerintahan desa menjadi lebih transparan, akuntabel, efisien dan efektif. SID merupakan bagian dari *e-goverment*, yang berperan mendorong transparansi adminstrasi, sehingga mencegah terjadinya korupsi dan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mengawasi kebijakan (Aryani & Kusumaningrum, 2024). Kalurahan Panggunharjo merupakan desa yang sejak awal 2017 sudah mengimplementasikan SID melalui pendirian lembaga desa

PSID (Pengelola SID), yang bertanggung jawab dalam pengisian data maupun kemanfaatan SID ini untuk perencanaan pembangunan desa.

Sistem informasi desa merupakan faktor penting dalam pembangunan pedesaan melalui sistem informasi memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi arah pembangunan desa secara akurat, sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya desa. Namun, implementasi SID tidaklah mudah, ada beberapa faktor yang memengaruhi implementasi tersebut yakni sumberdaya manusia, infrastruktur dan pendanaan. Adanya kesenjangan sumberdaya, infrastruktur dan pendanaan seringkali menjadi penghambat dalam implementasi SID.

Implementasi SID sebagai suatu program desa berkaitan dengan kerjasama antar pihak karena implementasi program tidaklah tunggal tetapi berkaitan dengan bidang-bidang lain. Implementasi SID bukan tanggung jawab desa namun lebih ke pemerintah daerah di atasnya namun tidak ada regulasi yang melarang desa untuk melakukan inisiasi sendiri. Bila desa melakukan inisiasi sendiri tentunya adanya koordinasi dan komunikasi dengan berbagai *stakeholders*.

*Stakeholders* merupakan individu atau kelompok yang memiliki kepentingan, ikut terlibat dan memengaruhi dan dipengaruhi suatu program atau kegiatan (RE Freeman et al., 2007; Berliandaldo et al., 2021). *Stakeholders* yang berkaitan dengan implementasi SID adalah pemerintah desa, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah daerah, dan penyedia teknologi atau LSM.

Perlunya koordinasi dan komunikasi diwujudkan dalam sinergitas antar *stakeholders*. Sinergitas berarti perlu adanya kolaborasi antar pihak *stakeholder*. Menurut Covey (Najiyat dan Rahmat, 2011; Rahmawati et al., 2014) sinergi merupakan perpaduan atau gabungan berbagai unsur atau bagian yang menghasilkan luaran atau *output* yang lebih baik, terbentuknya sinergi dilakukan dengan komunikasi dan koordinasi.

Komunikasi merupakan instrumen dalam menyebarkan berbagai informasi untuk dikerjakan semua orang yang terlibat sehingga tercipta sinergi. Sehingga bisa dikatakan kecakapan utama untuk menciptakan sinergi adalah kemampuan berkomunikasi (Hermana et al., 2004)(Rahmaveda, 2017). Koordinasi merupakan bagian dari fungsi organisasi yang meliputi pada setiap level mulai dari *planning-organizing-activating* dan *controlling* (Rahmaveda, 2017). Dari konsep di atas berarti untuk mengimplementasikan SID membutuhkan sinergitas antar *stakeholders* yang berarti dapat dilihat dari komunikasi dan koordinasi yang dilakukan.

Saat ini implementasi SID belum menyeluruh di semua desa, dalam praktiknya, masih banyak desa yang menghadapi berbagai tantangan dalam mengimplementasikan SID secara optimal. Rendahnya literasi digital, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi lintas pihak, serta belum adanya standar kerja sama yang jelas menjadi penghambat utama. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana sinergitas antar *stakeholders* dapat dibangun dan diperkuat dalam konteks implementasi SID.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan implementasi SID serta sinergitas *stakeholders*, penelitian dengan judul *Good Governance: Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Magelang*, fokus mengkaji implementasi SID di Kabupaten Magelang yang masih banyak kendala (Romanti et al., 2024). Hasil penelitian menunjukkan implementasi SID di Kabupaten Magelang belum optimal karena faktor komunikasi, sumberdaya manusia, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum yuridis dan sosiologi. Penelitian kedua, dengan judul *Problematika Penerapan SID di Indonesia*, hasil penelitian menunjukkan penerapan SID di Indonesia memiliki tantangan, baik secara internal maupun eksternal. Permasalahan internal menyangkut kurang akuratnya data administrasi desa, lemahnya sumberdaya dalam mengelola SID, partisipasi atau pelibatan masyarakat kurang dan aplikasi yang tidak sesuai dengan karakteristik kebutuhan desa. Faktor eksternal tampak dari kurang siapnya pemerintah daerah dalam memberikan fasilitasi pengembangan SID (Romanti et al., 2024).

Penelitian pertama memiliki kesamaan penelitian yang melihat pada implementasi SID, namun penelitian ini lebih fokus fasilitasi kabupaten untuk mengimplementasikan SID di desa-desa Kabupaten Magelang. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan hukum yuridis dan sosiologi. Penelitian kedua melihat problematik penerapan SID di Indonesia, yang berarti melihat

dari sisi makro, penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Kesamaannya penelitian ini melihat implementasi SID sejak diterapkan sesuai UU Desa.

Dari kedua penelitian di atas, maka *state of the art* penelitian ini lebih memfokuskan pada implementasi SID di Kalurahan Panggunharjo yang merupakan salah satu desa yang berhasil mengimplementasikan SID dengan inisiasi dari desa. Penelitian ini lebih melihat pada sisi sinergitas *stakeholders*, dengan menitikberatkan pada komunikasi dan koordinasi yang merupakan elemen pokok mewujudkan sinergitas.

### **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan pendekatan kritis. Penelitian ini menyajikan gambaran yang spesifik mengenai situasi, penataan sosial atau hubungan (Neuman, 2017). Analisis data dapat bersifat sekunsial dan interaktif, adanya sajian dan kesimpulan akan saling memengaruhi satu sama lain. Penyajian data membantu peneliti dalam menentukan pola-pola, teks pertama yang merasionalisasi sajian data dan menuntut analisis baru berubah ke dalam bentuk data tersaji, revisi dan perluasan data tersaji menunjukan pada pola relasi dan penjelasan baru yang menjadikannya semakin unik dalam satu kesatuan teks dan seterusnya (K.Denzin & Lincoln, 2009).

Alasan pemilihan Kalurahan Panggunharjo yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Bantul dengan Kota Yogyakarta, sebagai daerah sub-urban. Kondisi masyarakatnya heterogen, ada yang bekerja di sektor pertanian, wiraswasta, PNS atau sektor lain. Kalurahan Panggunharjo merupakan desa yang sukses dalam mengembangkan SID atas inisiasi desa. Kalurahan Panggunharjo juga merupakan salah satu desa yang inovatif dan sangat baik dalam menjalankan reformasi tata kelola desa (Hendra et al., 2022).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada informan yang berasal dari: kepala desa dan carik, *jagabaya* (kasi pemerintahan) dan pengelola SID Panggunharjo, unsur masyarakat yang terdiri dari anggota PKK, kepala dusun dan karang taruna. Penelitian dilakukan selama kurang lebih 12 bulan pada tahun 2023-2024. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*, yakni, menentukan informan dengan pertimbangan tertentu yakni seseorang yang dipandang memiliki kapabilitas dan kompeten untuk memberikan data secara maksimal. Kedua dengan observasi dan FGD dilakukan lebih lanjut terhadap kelompok masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan SID. Kelompok ini mewakili kelompok formal maupun informal desa/pedukuhan yaitu pemerintah desa dan BPD serta kelompok-kelompok masyarakat desa serta studi kepustakaan. Teknik triangulasi data dilakukan dengan konfirmasi antara teknik wawancara dan FGD serta data observasi dan dokumentasi.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan teknik analisis interaktif yang dimulai dengan pengumpulan data melalui wawancara, FGD, dan observasi serta kepustakaan. Hasil perolehan data dimaknai dan dinterpretasikan serta mengembangkan temuan dengan teori terkait.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kalurahan Panggunharjo menjadi salah satu desa yang sejak awal telah menginisiasi SID dengan pendanaan dari desa. Keberadaan SID bagi Panggunharjo diharapkan memberdayakan masyarakat desa dengan memberikan akses informasi yang lebih luas dan alat/media untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. SID merupakan sistem yang dirancang untuk membantu pengelolaan data dan informasi di tingkat desa, tujuan adanya SID untuk meningkatkan transparansi, partisipasi, dan efisiensi pelayanan desa.

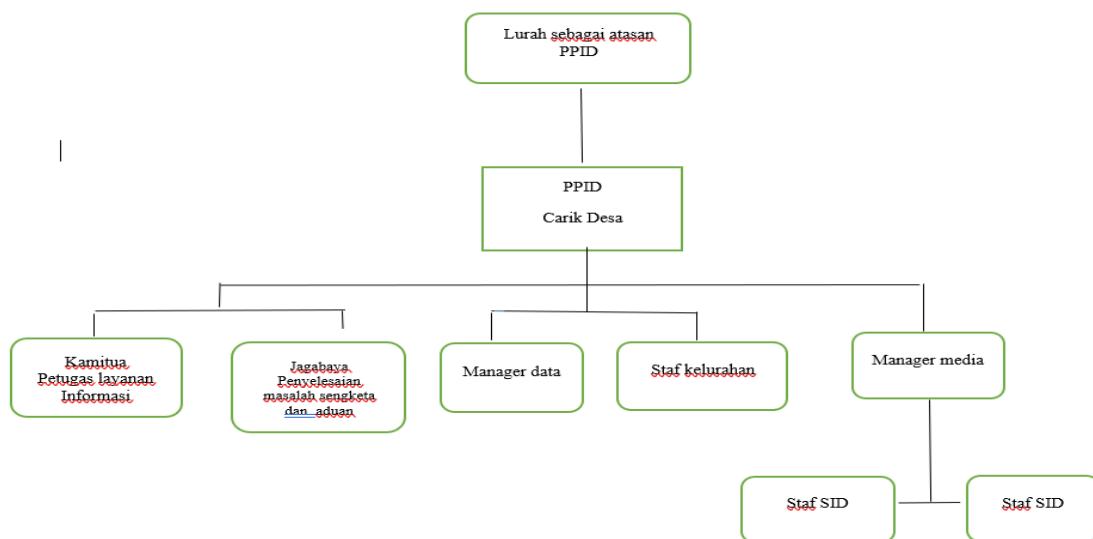
Masyarakat Panggunharjo sebagian besar bermata pencaharian petani, pekerja lepas/swasta dan pegawai negeri. Wilayah Panggunharjo bukan merupakan tanah pertanian yang subur, bahkan cenderung gersang serta tidak memiliki objek wisata yang menonjol seperti candi, wisata alam dan lain-lain. Namun, Panggunharjo merupakan salah satu desa di Indonesia yang berprestasi, mendapatkan penghargaan sebagai desa terbaik pada tahun 2014, pada tahun 2022.

Menurut Wahyudi, Lurah desa saat itu, SID merupakan bagian dari upaya desa untuk melakukan reformasi birokrasi desa. Adanya sistem informasi yang terlembagakan maka bukan hanya membantu pelayanan ke masyarakat dalam pengurusan surat tetapi dapat memunculkan pola hubungan dan kultur yang baru.

Reformasi pelayanan publik yang mencita-cita desa mendorong layanan pemerintahan desa diperluas tidak hanya pada tataran administrasi, tetapi juga di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan budaya. Untuk itu perlu adanya basis data yang valid tentang masyarakat Kalurahan Panggunharjo, dengan memanfaatkan SID untuk penyimpanan dan pendokumentasian data yang selalu diperbarui dan valid.

Wahyudi selaku Lurah Panggunharjo berinisiatif membangun SID atas inisiasi desa sejak tahun 2015 dengan pendanaan dari dana desa. Keberadaan SID ini menggunakan aplikasi yang sama dengan sebelumnya yakni aplikasi yang diluncurkan oleh CRI (*Combien Resources Institutions*). SID mulai tahun 2017 dikembangkan dengan membentuk pengorganisasianya. Organisasi ini diinisiasi desa yang dinamakan Pengelola Sistem Informasi Desa (PSID) sebagai lembaga khusus untuk menangani bidang informasi yang dibutuhkan masyarakat untuk mempermudah pelayanan dan menyampaikan informasi tentang desa mulai dari anggaran hingga berbagai kegiatan di desa. PSID bekerja di bawah Kasi Pemerintahan (Jagabaya).

Berikut bagan struktur organisasi PSID :



Gambar 1: Struktur Organisasi PSID

Sumber: web desa 2024

Dari bagan di atas tampak struktur pengelolaan di organisasi PSID, dilihat dari strukturnya PSID walaupun bukan perangkat desa namun memiliki keterkaitan untuk komunikasi dan koordinasi dengan perangkat, terutama bila menyangkut data. Jadi kewenangan data ada di perangkat desa dan nantinya diolah oleh PSID. Biasanya data-data disajikan dalam bentuk infografis untuk memudahkan masyarakat membacanya. Sedangkan bagian media berhubungan langsung dengan layanan informasi.

Secara rinci masing-masing peran masing-masing *stakeholders* dalam implementasi SID adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Peran dan Tugas *Stakeholders*

No	Stakeholders	Peran dan Tugas
1.	Kepala Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki ide dan mewujudkan inisiasi desa dalam mengimplementasikan SID</li> <li>b. Membuat kebijakan untuk desa</li> <li>c. Membuat lembaga sebagai pengelola SID</li> </ul>
2.	Ketua Tim Pengelola SID	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bertanggung jawab atas sistem informasi dan pengelolaan data secara berkesinambungan.</li> <li>b. Bersama dengan tim melakukan <i>entry</i> data dan mengolahnya menjadi informasi bagi perangkat desa dan masyarakat.</li> <li>c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Lurah</li> <li>d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pengelola Sistem Informasi dan Data.</li> </ul>
3	Jagabaya/Ka.Ur pemerintahan	Ikut memantau implementasi SID dan menyampaikan laporan ke Lurah terkait isian web desa.
4.	Carik Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membantu tugas Lurah untuk koordinasi dengan pengelola SID</li> <li><u>Mengkoordinasikan hasil data PSID ke semua bagian</u></li> </ul>
5	Warga masyarakat	Partisipasi aktif dalam mengakses informasi, mengawasi kebijakan dan memberikan usul ke desa

Sumber: olahan peneliti 2024

Dari tabel di atas tiap *stakeholder* memiliki peran dan tugas masing-masing yang semuanya dikoordinasikan oleh Lurah. Lurah memberikan mandat kepada PSID untuk bertanggungjawab atas terimplementasinya SID di Panggungharjo. PSID terdiri dari orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi sehingga desa tidak memiliki kendala dalam masalah teknis. Permasalahan pengisian aplikasi SID menjadi tugas PSID, demikian juga keberlanjutan dan inovasi dari aplikasi tersebut. Hal ini menjadikan PSID tidak tumpang tindih dengan perangkat kalurahan karena kompetensi teknis lebih kuasai oleh PSID bahkan dengan adanya lembaga ini memberikan bantuan dalam pengisian aplikasi. Misalnya, permasalahan menyangkut program aplikasi baru yang harus diisi desa, perangkat desa melakukan koordinasi dengan tim PSID. Untuk pengisian *web* desa juga menjadi tanggung jawab PSID yakni bagian media. Informasi atau berita yang akan diisikan dapat disampaikan oleh elemen-elemen desa bahkan warga pun dapat namun nantinya akan diolah oleh tim PSID.

Peran warga untuk ikut berpartisipasi dalam mengakses informasi dan mengawasi serta memberikan usulan melalui SID. Namun, menurut pengelola PSID partisipasi masyarakat untuk mengakses SID tidaklah besar, menyampaikan kritikan melalui SID masih sangat sedikit. Pemanfaatan *web* desa sebagai bagian SID lebih besar karena informasi yang disampaikan melalui *web* desa selalu *up date* terbaru.

## **Komunikasi dan Koordinasi untuk Sinergitas *Stakeholders***

Implementasi SID di Panggungharjo ada di bawah kendali PSID. PSID sebagai lembaga desa yang berdiri sejak dirintisnya SID pada tahun 2015 dengan mendirikan *website* desa dan 2016 melengkapi dengan fitur pelayanan. Program SID dibangun dengan mengkompilasikan lima peta data dikompilasikan menjadi satu, wujudnya menjadi bagian dari transparansi publik, konsultasi publik, pemberdayaan dan pelayanan. PSID terdiri dari bagian IT dan media, PSID merupakan lembaga desa yang memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan SID.

Namun, implementasi SID tidak akan mampu berjalan dengan baik tanpa adanya sinergitas *stakeholders*. Sinergitas merupakan relasi atau hubungan komunikasi yang terjalin atas integrasi atau kerjasama atau interaksi yang menghasilkan pengaruh yang lebih besar (Stephen Covey, 2004; Rahmaveda, 2017). Sinergitas *stakeholders* merupakan suatu jalinan dengan kerjasama antar *stakeholders* yang saling mendukung demi keberhasilan suatu program yang dilakukan melalui komunikasi dan kordinasi (Rahmawati et al., 2014).

Komunikasi yang dilakukan antar *stakeholders* dalam implementasi SID dilakukan dengan baik seperti yang disampaikan oleh Pengelola PSID:

“Komunikasi yang dilakukan sesuai struktur PSID, jadi bila ada informasi atau kebijakan yang akan disampaikan maka Pak Lurah langsung menginformasikan ke kami. Sedangkan data yang wajib kami unggah misalnya data kependudukan kami biasanya mendapatkan informasi dari Jagabaya”

Demikian pula yang disampaikan oleh Carik Desa:

“Dengan adanya PSID yang merupakan lembaga desa, kami terbantu sekali karena data kami tinggal minta bantuan mereka, sedangkan untuk penyampaian informasi dari desa Jagabaya atau saya sebagai carik akan menyampaikan ke PSID”

Dari kutipan wawancara di atas tampak kegiatan komunikasi yang dilakukan antar *stakeholders* berjalan dengan baik Komunikasi dilihat dari manajemen: 1) Sebagai kegiatan ketika seseorang memindahkan stimuli untuk mendapatkan tanggapan; 2) Komunikasi berorientasi pada penerima dengan memandang komunikasi sebagai semua kegiatan ketika seseorang menanggapi stimulus atau rangsangan (Sofyandi & Garniwa, 2007).

Sinergitas *stakeholders* bertumpu pada dua hal yakni komunikasi dan koordinasi. Dalam koordinasi pun perlu adanya komunikasi. Sehingga bisa dikatakan sinergitas untuk penelitian ini tergantung dari komunikasi dan koordinasi yang dilakukan *stakeholders*. Sinergitas antara *stakeholders* dalam pengembangan SID adalah kunci utama untuk menciptakan sistem yang efisien dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

Komunikasi yang dilakukan antar *stakeholders* secara langsung tatap muka atau menggunakan media (WA, FB). Peran masing-masing *stakeholders* sudah jelas sehingga dalam implementasi SID komunikasi berjalan dengan baik. Komunikasi dilakukan secara efektif sesuai peran masing-masing. Hal ini juga disampaikan oleh kamituo:

“Keberadaan PSID sangat membantu kami, terutama ketika kami harus membuat laporan pendataan melalui aplikasi yang baru, dengan adanya PSID kami sangat terbantu apalagi mereka memiliki kompetensi untuk menguasai teknologi dibanding kami” .

Sedangkan koordinasi adalah penyatuan kegiatan unit-unit kerja antar lembaga atau organisasi untuk bekerjasama dan menjadi satu kesatuan serta saling berhubungan guna mencapai tujuan organisasi (Wulandari & Salam, 2022). Koordinasi dipengaruhi faktor-faktor: 1) Kesatuan tindakan yang terwujud bila fokus, sederhana dan menjadikan tindakan sebagai orientasi; 2) Komunikasi berperan penting dalam hubungan kerja karena komunikasi

mengkoordinasi antar unit organisasi; 3) Pembagian kerja, mendukung koordinasi agar berperan mencapai tujuan organisasi; 4) Disiplin, baik disiplin waktu dan perilaku kerja dan anggaran (Hasibuan, 2007; Wulandari & Salam, 2022). Koordinasi yang dilakukan dalam implementasi SID dapat dilakukan karena adanya kesamaan visi sesuai arahan lurah. Salah satu target lurah Wahyudi ketika menjadi lurah di tahun 2015 adalah pertamakali desa bukan hanya melayani administrasi tetapi mampu menjadi lembaga yang melayani masyarakat, untuk itu berdiri lembaga-lembaga desa yang salah satunya adalah PSID. PSID memiliki target untuk menyediakan data desa yang valid dan akurat serta mendampingi desa untuk melakukan inovasi teknologi informasi. Pembagian kerja yang jelas dan adnya komunikasi yang baik mendukung koordinasi sehingga sinergitas stakeholders dapat terwujud.

### **Relasi Agen dan Struktur untuk sinergitas *stakeholders***

Dalam implementasi SID, sinergitas *stakeholders* terwujud karena adanya komunikasi dan koordinasi. Koordinasi dimungkinkan dapat berjalan dengan baik karena adanya kepimpinan kepala desa. Komunikasi dan koordinasi yang mendukung sinergitas *stakeholders* dalam artikel ini dilihat dari teori strukturalis. Secara konseptual teori, ini bertumpu pada ide tentang struktur, sistem dan dualitas struktur. Struktur merupakan penyusun yang memungkinkan adanya praktik-praktik sosial berulang dalam rentang waktu dan ruang (Ritzer & Goodman Douglas J., 2008). Struktur hanya akan muncul di dalam dan terjadi karena adanya aktivitas para agen (aktor), sehingga struktur bukanlah dari luar yang kemudian memaksa para agen.

Teori strukturalis menekankan keterkaitan struktur dan agen dalam relasi dualitas. Struktur dan agen saling terkait tanpa dipisahkan dalam praktik sosial manusia. Gidden menekankan bahwa agen merupakan orang-orang yang terlibat dalam aliran tindakan yang berkesinambungan, artinya agen adalah agen ada di dalam praktik sosial, agen dipandang baik sebagai individu maupun kelompok (Priyono, 2002). Teori strukturalis digunakan untuk menganalisis peran agen-agen dan struktur dalam pengembangan SID. Agen memiliki peran yang besar dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan SID sebagai inovasi baru diterapkan di desa. Agen dalam hal ini merupakan orang yang mampu mendorong adanya pengembangan SID dalam rangka memberdayakan masyarakat desa.

Seorang agen/aktor tidak akan dapat bertindak tanpa adanya struktur, Wahyudi selaku lurah memiliki 3 struktur signifikansi, kedudukan lurah merupakan struktur signifikansi sebagai kepala desa yang telah memiliki kemampuan kepemimpinannya sebagai lurah. Struktur dominasi, tampak ketika lurah memiliki kewenangan/otoritatif untuk memimpin dan mengambil tindakan Terakhir struktur legitimasi, sebagai lurah, dibenarkan untuk memimpin karena memiliki legitimasi, pembentukan lembaga desa baru ditujukan untuk mengawal nilai dan norma dalam pemerintahan desa. Reorganisasi desa merupakan inisiatif Wahyudi selaku lurah desa, yang dalam hal ini sesuai dengan teori strukturalis, agen dan struktur tidak dapat dipahami dalam keadaan terpisah satu sama lain, agen dan struktur merupakan dwi rangkap, agen dan struktur saling jalin menjalin dalam praktik dan aktivitas manusia (Ritzer & Goodman Douglas J., 2008).

Terbentuknya lembaga baru merupakan inovasi kepala desa pada saat awal menjabat. Seperti yang dikatakan Carik Kalurahan Panggunharjo,

“Memunculkan lembaga-lembaga desa yang lokal untuk kebutuhan desa, ini berbeda dengan lurah yang dulu. Hal ini dilakukan dengan merekrut orang-orang di luar pamong desa, dan memang membebani anggaran desa tetapi hal ini sangat membantu kerja perangkat desa. ”

SDM lembaga desa dan dikerjakan oleh orang Panggunharjo di luar perangkat desa, yang dilihat dari keahlian dan kompetensi yang dimilikinya. Misalnya untuk PSID diisi orang-orang

yang memang menguasai bidang IT, Lembaga Mediasi Desa (LMD) diisi orang yang memiliki kompetensi hukum. Pembiayaan dibebankan di anggaran desa sesuai kompetensi yang bersangkutan dan menekankan pada SDM dari Kalurahan Panggunharjo sehingga menjadi bagian dari pelibatan masyarakat Panggunharjo dalam menyelesaikan persoalan desa.

Menurut Giddens, struktur bukan bersifat eksternal bagi individu-individu melainkan dalam pengertian tertentu lebih bersifat internal, yang penerapannya bersandar pada diri aktor/subjek yang bersifat otonom serta memiliki andil untuk mengontrol struktur sendiri (Giddens, 2016; Priyono, 2016). Dalam hal ini Lurah membentuk struktur bersifat internal dan memiliki andil dalam mengontrol struktur sendiri. Struktur merupakan hal-hal yang menstrukturkan (aturan dan sumberdaya) dan hal-hal yang memungkinkan terjadinya praktik sosial yang dapat dipahami adanya kesamaan atau kemiripan di ruang dan waktu, dan yang memberi bentuk sistemik.

Keberadaan SOP dan kebijakan yang jelas merupakan bagian dari struktur yang mendukung para agen dalam mengimplementasikan SID. Kasi pemerintahan (*Jogoboyo*) menjalankan tugas dan peran sesuai tupoksi yang bertanggung jawab atas administrasi kependudukan, pertanahan desa, memfasilitasi kerjasama dan lain-lain. Sedangkan PSID bertanggung jawab atas pendataan *online* yang ada di SID namun data diperoleh dari kasi pemerintahan. Dalam pemantauan data, kasi pemerintahan memiliki tanggung jawab atas keseluruhan data kependudukan. Hal yang penting adalah kesamaan persepsi atas implementasi SID ini juga memudahkan para agen dalam bertindak. Sesuai teori strukturalis Giddens, agen merupakan individu atau aktor yang memiliki kapasitas sehingga mampu bertindak secara reflektif dan memiliki kemampuan untuk memengaruhi dan mengubah struktur sosial, yang dalam praktiknya agen bisa merupakan kelompok atau lembaga yang keputusannya memengaruhi struktur sosial (Giddens, 2016).

Hal ini menjadikan PSID sebagai lembaga pengelola SID juga menjadi agen yang memiliki wewenang untuk menangani infomasi yang dibutuhkan masyarakat baik untuk pembuatan aplikasi dan mempermudah akses layanan melalui SID, menyampaikan informasi kegiatan desa beserta mengolah laporan desa untuk disampaikan ke SID. PSID merupakan agen dan struktur, sebagai hasil dari tindakan yang berulang. Lurah mendirikan PSID merupakan dualitas dari struktur dan agen, Giddens menekankan praktik sosial yang sedang berlangsung melintas ruang, waktu dan tindakan manusia. Dalam teori strukturalis, kesadaran praktis lebih dipentingkan dibanding yang lain karena lebih mencerminkan apa yang dilakukan agen, bukan apa yang dikatakan (Ritzer & Goodman Douglas J., 2008; Ferry J. Juliantono & Aris Munandar, 2016). Keberadaan lembaga PSID menjadi bukti adanya tindakan yang dilakukan oleh agen untuk menjadikan sistem informasi desa sebagai bagian dari pengaturan sistem komunikasi di desa.

## Kesimpulan

Sinergitas *stakeholders* memiliki peran penting dalam implementasi SID di Kalurahan Panggunharjo. Dengan adanya sinergitas *stakeholders* terjadinya komunikasi dan koordinasi antar *stakeholders* yakni antara perangkat desa dengan PSID sebagai lembaga yang bertanggungjawab. Kepemimpinan kepala desa mampu menggerakkan semua pihak saling berkoordinasi dan memiliki tanggung jawab pada bagianya. Masing-masing pihak merupakan agen (aktor) yang mendukung implementasi SID sesuai peran masing-masing.

Hal ini sesuai dengan teori strukturalis yang bertumpu stuktur, sistem dan dualitas struktur. Keberadaan PSID sebagai lembaga desa baru mampu memainkan praktik dalam mengimplementasikan SID ke masyarakat. Adanya pembagian kerja yang jelas dan visi misi desa yang dipahami bersama menguatkan sistem yang berlaku di Panggunharjo. Kepimpinan yang bersinergi dengan sistem yang dibangun mendukung sinergitas *stakeholders* dalam implementasi SID.

## Daftar Pustaka

- Almira Rahmaveda. (2017). Pemberdayaan Anak Jalanan di Kota Surabaya (Sinergitas antar Stakeholders dalam Peningkatan Kemandirian Anak Jalanan. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 5 (3), 1–8. <http://journal.unair.ac.id/KMP@pemberdayaan-anak-jalanan-di-kota-surabaya-article-11727-media-138-category-.html>
- Aryani, L., & Kusumaningrum, R. (2024). Improving village information systems for sustainable development in Karawang Regency, Indonesia. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(3), 627–646. <https://doi.org/10.26618/ojip.v14i3.16303>
- Berliandaldo, M., Chodiq, A., & Fryantoni, D. (2021). Kolaborasi dan Sinergitas Antar Stakeholder dalam Pembangunan Berkelanjutan Sektor Pariwisata Di Kebun Raya Cibinong. *INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 04 (02), 221–234. <http://inobis.org/ojs/index.php/jurnal-inobis/article/view/179>
- Ferry J. Juliantono, & Aris Munandar. (2016). Fenomena Kemiskinan Nelayan: Perspektif Teori Strukturasi Fishermen Poverty Phenomenon: Structuration Theory Perspective. *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan*, 12/2, 1857–1866.
- Giddens, A. (2016). *Teori Strukturalis, Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*. Pustaka Pelajar.
- Hasibuan, M. S. (2007). *Manajemen Sumberdaya*. Bumi Aksara.
- Hendra, O., Janah, M. M., Indriani, D., & Hendra Fakultas Ilmu Administrasi, O. (2022). DESA PANGGUNGHARJO YOGYAKARTA: SEBUAH PRAKTIK TERBAIK DARI REFORMASI TATA KELOLA DESA. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 14(1), 117–134. <https://doi.org/10.33701/jiabd.v14i1>
- Hermana, D., Ujang, &, & Barlian, C. (2004). KOMUNIKASI DALAM ORGANISASI. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 2. <https://ejournal.upi.edu/index.php/JAPSPs/article/view/6071>
- Hermawan, E., Panjaitan, H., Listiorini, D., & Kunci, K. (2024). *OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI MANAJEMEN DESA: STUDI KASUS PADA DESA X OPTIMIZING THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN IMPROVING VILLAGE MANAGEMENT EFFICIENCY: CASE STUDY IN VILLAGE INFO ARTIKEL ABSTRAK*.
- K.Denzin, N., & Lincoln, Y. S. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Pustaka Pelajar.
- Nely Suwidyanti. (2023). Peran Good Governance Melalui Reformasi Birokrasi dan E-Government Guna Meningkatkan Penyelenggaran Pemerintahan Berbasis Kinerja di Kota Surabaya. *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumberdaya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 10, 530–543. <https://doi.org/https://doi.org/10.37606/publik.v10i2.560>
- Neuman, W. L. (2017). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi 7*. Indeks.
- Nugraha, J. T. (2018). E-GOVERNMENT DAN PELAYANAN PUBLIK (STUDI TENTANG ELEMEN SUKSES PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN). *Komunikasi Dan Kajian Media*, 2 (1). <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/758/547>
- Nugroho, Y. (2010). NGOs, the internet and sustainable rural development: The case of Indonesia. *Information Communication and Society*, 13(1), 88–120. <https://doi.org/10.1080/13691180902992939>
- Nur, I., & Maulani, I. (2024). Live Streaming TikTok sebagai Media Komunikasi Pemasaran Digital TMADE Artisan Souvenir. *PIKMA Jurnal Publikasi Ilmu Komunikasi Media Dan Cinema*, 7 (1).
- Priyono, B. H. (2016). *Antony Giddens, Suatu Pengantar*. KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Rahmaveda, A. (2017). PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN DI KOTA SURABAYA (Sinergitas Antar Stakeholders dalam Peningkatan Kemandirian Anak Jalanan). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 5 (3). <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmpb1f83698f2full.pdf>
- Rahmawati, T., Noor, I., & Wanusmawatie, I. (2014). Sinergitas dalam Inovasi Daerah (Studi pada Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2 (4), 635–641.

- RE Freeman, JS Harrison, & AC Wicks. (2007). *Managing for Stakeholders: Survival, Reputation and Success*.
- Ritzer, G., & Goodman Douglas J. (2008). *Teori Sosiologi Modern*. Prenada Kencana.
- Romanti, V. A., Sintha Dewi, D. A., Noviasari, D. T., & Suharso, S. (2024). Good Governance: Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Magelang. *Borobudur Law and Society Journal*, 3(4), 161–170. <https://doi.org/10.31603/11773>
- Sofyandi, H., & Garniwa, I. (2007). *Perilaku Organisasional, Edisi pertama*. Graha Ilmu.
- Stephen Covey. (2004). *The 7 Habits of Highly Effective People*. Binarupa Aksara.
- Thomas L. Wheelen, J. David Hunger, Alan N. Hoffman, & Charles E. Bamford. (2015). *Strategic, Management and Business Policy, Globalization, Innovation and Sustainability* (FOURTEENTH EDITION). Pearson.
- Wulandari, S. D., & Salam, R. (2022). Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah dalam Penanggulangan Banjir di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal MODERAT*, 8 (3), 534–548.